

Amalia. S. N., Bazarah. J., Ghufron (2026). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Proses Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur. *Prediksi*. Vol. 25 (2) 429-440.

Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Proses Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Siti Nurmi Amalia^{1*}, Jamil Bazarah², Ghufron³

^{1,2,3} Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Email: ¹nurmi.amalia100101@gmail.com, ²jbazarah@gmail.com, ³fron.alghufroni@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received:

30 Mei 2026

Received in revised form:

29 Juni 2026

Accepted:

24 Juli 2026

Keyword:

Good Governance, Civil Servants Candidates.

Kata Kunci:

Good Governance, Calon Pegawai Negeri Sipil

ABSTRACT

This research aims to describe the Application of Good Governance Principles in the Process of Selection Candidates for Civil Servants at the Regional Civil Service Agency of East Kalimantan Province as stipulated in Law Number 28 of 1999, especially the principles of accountability, transparency and fairness in the Process of Selection Candidates for Civil Servants. This research was carried out at the Regional Civil Service Agency East Kalimantan Province. In this research, researchers used a qualitative approach to the data obtained in the form of descriptive data. The data analysis technique used is based on the Miles and Huberman model which is called the interactive model, including; data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of this research prove the implementation of Good Governance in the Process of Selection Candidates for Civil Servants at the Regional Civil Service Agency East Kalimantan Province has been going well, carried out in an accountable, transparent and fair. The realization of Good Governance is because the CAT system contributes to Process of Selection Candidates for Civil Servants in a direction that is free from Corruption, Collusion and Nepotism so that everyone can oversee the ongoing selection process through the existing media. Different to using earlier conventional/paper test based where easily damaged, inefficient, and less transparent. In general, almost all Process of Selection Candidates for Civil Servants at the Regional Civil Service Agency East Kalimantan Province are in accordance with existing rules and regulations. Even though it hasn't reached the maximum point, sometimes the portal often experiences interruptions during the reception period due to the large number of accessors at the same time. On the other hand, there are still deficiencies that must be corrected so that the objectives of the CAT system are achieved with maximum results, namely regarding the lack of adequate computers so that the goals are felt to be less than optimal. The implementation of the principle of justice has been going well.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Proses Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, terutama prinsip akuntabilitas, transparansi dan keadilan dalam proses penerimaan CPNS. Penelitian ini dilaksanakan di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Timur. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif data dengan memperoleh data deksriptif. Teknik analisis data yang digunakan berpedoman pada model Miles dan Huberman dengan model interaktif, meliputi : Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Penerapan Good Governance dalam proses penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di BKD Provinsi Kalimantan Timur sudah berjalan dengan baik dilaksanakan dengan akuntabel, transparan, dan adil. Terwujudnya prinsip transparansi karena sistem CAT berkontribusi dalam proses penerimaan CPNS ke arah yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sehingga semua orang dapat mengawasi proses seleksi yang sedang berjalan melalui media. Berbeda dengan basis konvensional terdahulu hasil cetakan LJK mudah rusak, tidak efisien, dan kurang transparan. Secara prinakuntabilitas, hampir semua proses penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil pada BKD Provinsi Kalimantan Timur sudah sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada. Walaupun belum mencapai titik yang maksimal terkadang portal mengalami gangguan saat masa penerimaan berlangsung dikarenakan banyak jumlah pengakses. Di sisi lain terdapat kekurangan yang harus diperbaiki agar tujuan dari CAT tercapai yaitu kurangnya komputer yang memadai sehingga tujuan dirasa kurang maksimal. Penerapan prinsip keadilan sudah berjalan dengan baik.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

* Corresponding author: nurmi.amalia100101@gmail.com

PENDAHULUAN

Masyarakat di negara Indonesia sejak lama mengharapkan pemerintah dapat menerapkan sistem pemerintahan yang baik, Good Governance dijadikan suatu harapan oleh masyarakat agar dapat tercapainya pemerintahan yang ideal dan juga optimal karena memiliki sembilan tolak ukur yang dapat dijadikan sebagai suatu pelaksanaan pemerintahan yang baik : pejabat pemerintah yang profesional dalam mewujudkan keadilan, transparan, dan akuntabel.

Kini pada tiap unsur pemerintahan para pemerintah di Indonesia telah bergerak maju menuju penerapan prinsip Good Governance yaitu pemerintahan yang bersih dengan aparat birokrasi tanpa KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Tata pemerintahan yang baik merupakan premis utama dalam mewujudkan aspirasi masyarakat, tujuan dan cita-cita berbangsa dan bernegara.

Di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme pada Pasal 3 secara tegas mengenai asas-asas dalam penyelenggaraan negara yang dijadikan sebagai acuan dan pijakan antara lain adalah asas keadilan, transparansi atau dengan kata lain keterbukaan, serta asas akuntabilitas. Dari semua prinsip-prinsip *Good Governance* harus menjadi pedoman bagi pemerintah daerah melaksanakan wewenang penerimaan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil). Hal ini bermaksud agar filosofi *the right man on the right place* yang berarti orang tepat di tempat tepat pada waktu yang tepat, tetap menjadi dasar pertimbangan dalam rangka penerimaan CPNS di setiap daerah, karena dinilai sangat syarat dengan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme (Da Cruz, 2021).

Dalam menjalankan seleksi CPNS tahun 2014 lalu, Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah menerapkan sistem rekrutmen berbasis Computer Assisted Test (CAT). CAT adalah suatu metode ujian dengan alat bantu komputer yang digunakan untuk mendapatkan standar minimal kompetensi dasar maupun standar minimal kompetensi kepegawaian (Perka BKN, 2014). Sistem rekrutmen tersebut menggunakan pendekatan komputerisasi artinya sistem seleksi CPNS akan menjalankan tes seleksi dengan menggunakan komputer secara langsung dan hasil penilaian melalui grade dapat dilihat saat itu juga (Perka BKN, 2014). Metode ini digunakan untuk meminimalisir dan mencegah terjadinya praktek-praktek KKN dalam seleksi CPNS, sehingga kedepan betul-betul dapat menghasilkan CPNS yang kompeten (Perka BKN, 2014). Terpenuhinya CPNS yang kompeten bergantung pada sistem rekrutmen CPNS yang transparan dan bebas praktik KKN.

Proses rekrutmen CPNS terkadang menimbulkan masalah baik dari internal maupun eksternal, masalah yang dihadapi yaitu adanya peserta CPNS yang sudah dinyatakan lulus mengundurkan diri, ada yang ingin minta tolong diluluskan test CPNS dan ada juga peserta yang mudah percaya oleh pihak luar yang menjanjikan atau menipu agar bisa lolos seleksi dengan mudah namun pihak BKD dengan tegas tidak menerima jalur titipan, ada juga yang pesertanya terlambat datang untuk mengikuti test dan ada juga yang tidak datang saat sesi pertama. Pada penelitian ini, peneliti mencoba melihat sejauh mana pelaksanaan prinsip-prinsip Good Governance pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Menurut Muslimin (2016) penelitian kualitatif ditunjukkan untuk menganalisis dan mendeskripsikan peristiwa, aktivitas sosial, pemikiran maupun sikap individu atau kelompok dengan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Dalam penelitian ini pihak yang dijadikan subjek penelitian yaitu yang dianggap memiliki informasi yang dibutuhkan di wilayah penelitian yaitu 1) Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi ASN BKD Provinsi Kalimantan Timur; 2) Pegawai di Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi ASN BKD Provinsi Kalimantan Timur; 3) Calon Pegawai Negeri Sipil yang pernah mengikuti rekrutmen berbasis Computer Assisted Test (CAT); dan 4) Calon Pegawai Negeri Sipil yang pernah mengikuti rekrutmen berbasis konvensional (LJK).

Adapun teknik pengumpulan data yang akan peneliti gunakan yaitu: Observasi Dokumentasi dan Wawancara.

Data dianalisis dengan menggunakan beberapa langkah sesuai teori Miles, Huberman dan Saldana (2014) adalah menganalisis data dengan empat langkah: pengumpulan data (data collection), kondensasi data (data condensation), menyajikan data (data display), dan menarik simpulan atau verifikasi (conclusion drawing and verification).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Akuntabilitas

Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang penerapan prinsip good governance termasuk akuntabilitas dalam proses penerimaan CPNS pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Pertanyaan diajukan oleh peneliti berdasarkan pedoman wawancara yang terdapat pada lampiran dengan menggunakan Bahasa Indonesia.

1. Fungsi Portal SSCASN

- a. Hasil wawancara dengan Bapak Andry selaku Kepala Bidang Pengadaan yaitu :
"Fungsi portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN), iya untuk mendaftar online akun CPNS."
- b. Hasil wawancara dengan Bapak Reza F selaku Pegawai Bidang Pengadaan yaitu :
"*Fungsi portal SSCASN, Sistem Seleksi CPNS Nasional adalah situs resmi pendaftaran CPNS secara nasional sebagai pintu pendaftaran pertama seleksi CPNS ke seluruh Instansi baik Pusat maupun Daerah dan dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara RI sebagai Panitia Seleksi CPNS Nasional.*"

2. Data Pribadi Pelamar Dipastikan Aman

- a. Hasil wawancara dengan Bapak Andry selaku Kepala Bidang Pengadaan yaitu :
"Data pribadi pelamar dapat dipastikan aman, karena data para pelamar hanya digunakan untuk kepentingan pendaftaran".

- b. Hasil wawancara dengan Bapak Reza F selaku Pegawai Bidang Pengadaan yaitu :
- "Data pribadi pelamar dapat dipastikan aman, Seluruh pengelolaan sistem informasi pengadaan CPNS dijamin keamanannya oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) yang secara khusus dijaga oleh Tim Pengamanan Teknologi. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi No. 27 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil".

3. Panitia Seleksi Mempunyai SOP

- a. Hasil wawancara dengan Bapak Andry selaku Kepala Bidang Pengadaan yaitu :
- "Panitia seleksi mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP) pengadaan CPNS, iya sebagaimana terlampir di Keputusan Gubernur Kalimantan Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Seleksi CPNS.". (Wawancara, 27 Februari 2023)
- b. Hasil wawancara dengan Bapak Reza F selaku Pegawai Bidang Pengadaan yaitu :
- "Panitia seleksi mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP) pengadaan CPNS, iya pasti karena kita bekerja ditentukan oleh kepatuhan kita terhadap SOP yang ada." (Wawancara, 27 Februari 2023)

4. Meminimalisir Pelamar Yang Mempunyai Banyak Akun

- a. Hasil wawancara dengan Bapak Andry selaku Kepala Bidang Pengadaan yaitu :
- "Meminimalisir pelamar yang mempunyai banyak akun, tidak bisa ya karena kan menggunakan NIK info lebih lanjut bisa tanyakan kepada Reza". (Wawancara, 27 Februari 2023)
- b. Hasil wawancara dengan Bapak Reza F selaku Pegawai Bidang Pengadaan yaitu :
- "Meminimalisir pelamar yang mempunyai banyak akun, oh tidak bisa dikarenakan untuk melakukan registrasi akun di portal SSCASN menggunakan NIK yang terhubung dengan data base kependudukan dan catatan sipil sehingga tidak memungkinkan seorang pelamar memiliki lebih dari satu akun." (Wawancara, 27 Februari 2023)

5. Waktu Yang Ditentukan Dalam Proses Pendaftaran

- a. Hasil Wawancara Dengan Bapak Andry Selaku Kepala Bidang Pengadaan Yaitu :
- "Lama waktu yang ditentukan dalam proses pendaftaran, biasanya diadakan pengumuman lowongan dulu dua minggu sebelum pendaftaran dibuka lalu pendaftaran dibuka ya sekitar kurang lebih dua minggu juga." (Wawancara, 27 Februari 2023)
- b. Hasil Wawancara Dengan Bapak Reza F Selaku Pegawai Bidang Pengadaan Yaitu :
- "Lama waktu yang ditentukan dalam proses pendaftaran, masa pendaftaran sebagaimana terhitung mulai dari pengumuman lowongan sampai dengan pendaftaran ditutup paling singkat adalah 15 hari kalender dan ini dapat bervariasi tergantung kebijakan panselnas. (Wawancara, 27 Februari 2023)

6. Tujuan Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Dibentuk

- a. Hasil Wawancara Dengan Bapak Andry Selaku Kepala Bidang Pengadaan Yaitu :

"Tujuan panitia seleksi instansi pengadaan dibentuk, pejabat pembina kepegawaian (ppk) yang membentuk panitia seleksi instansi pengadaan di bkd ya tujuannya untuk melaksanakan proses pengadaan cpns mulai dari perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, dan pengumuman hasil seleksi." (Wawancara, 27 Februari 2023)

- b. Hasil Wawancara Dengan Bapak Reza F Selaku Pegawai Bidang Pengadaan Yaitu :

"Tujuan panitia seleksi instansi pengadaan dibentuk, panitia seleksi instansi bertanggung jawab untuk menyiapkan secara rinci tahapan setiap kegiatan dalam pelaksanaan pengadaan cpns." (Wawancara, 27 Februari 2023)

7. Tujuan Pelaksanaan Penerimaan CPNS Harus Menerapkan Prinsip Akuntabilitas

- a. Hasil wawancara dengan Bapak Andry selaku Kepala Bidang Pengadaan yaitu :

"Pelaksanaan penerimaan CPNS harus menerapkan prinsip akuntabilitas, iya karena untuk mendapatkan CPNS yang jujur, bertanggung jawab dan profesional." (Wawancara, 27 Februari 2023)

- b. Hasil wawancara dengan Bapak Reza F selaku Pegawai Bidang Pengadaan yaitu :

"Pelaksanaan penerimaan CPNS harus menerapkan prinsip akuntabilitas, untuk mendapatkan calon pegawai negeri sipil yang memiliki karakteristik pribadi selaku penyelenggara pelayanan publik." (Wawancara, 27 Februari 2023)

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan proses penerimaan cpns pada bkd provinsi kalimantan timur berjalan dengan baik ini dibuktikan dengan; fungsi portal sscasn sudah berfungsi sebagaimana mestinya dimana seluruh peserta melakukan pendaftaran secara terpusat melalui satu portal dan diatur sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan serta pengelolaan data yang termuat didalamnya dijamin keamanannya, namun disisi lain karena keterbatasan teknis pada jaringan, seringkali portal mengalami gangguan saat masa penerimaan berlangsung dikarenakan banyak sekali jumlah pengakses dalam satu waktu yang bersamaan.

Transparansi

Paparan berikut merupakan deskripsi data tentang penerapan prinsip good governance termasuk transparansi dalam proses penerimaan cpns pada badan kepegawaian daerah Provinsi Kalimantan Timur yang didasarkan hasil wawancara.

1. Informasi Pendaftaran CPNS Diumumkan Secara Terbuka

- a. Pertama, hasil wawancara dengan Bapak Andry selaku Kepala Bidang Pengadaan yaitu :

"Informasi pendaftaran CPNS diumumkan secara terbuka atau transparan, iya karena ini merupakan komitmen kami sebagai penyelenggara untuk memberikan informasi sejelas-jelasnya dan seterbuka mungkin pada masyarakat." (Wawancara, 27 Februari 2023)

- b. Kedua, hasil wawancara dengan Bapak Reza F selaku Pegawai Bidang Pengadaan yaitu :

"Informasi pendaftaran CPNS diumumkan secara terbuka atau transparan, iya terbuka disebarkan melalui sosial media yang mudah dilihat dan diakses masyarakat." (Wawancara, 27 Februari 2023)

2. Sikap Yang Diambil Oleh Panitia Pengadaan Apabila Ditemukan Kecurangan

- a. Pertama, hasil wawancara dengan Bapak Andry selaku Kepala Bidang Pengadaan yaitu :
"Sikap yang diambil oleh panitia pengadaan apabila ditemukan kecurangan, kami selaku panitia seleksi instansi hanya berwenang untuk mencatat dan mengumpulkan informasi jika ada indikasi peserta yang melakukan kecurangan dan segala keputusan atas indikasi kecurangan tersebut menjadi wewenang panitia seleksi (BKN) yang akan di putuskan dalam rapat panitia seleksi." (Wawancara, 27 Februari 2023)
- b. Kedua, hasil wawancara dengan Bapak Reza F selaku Pegawai Bidang Pengadaan yaitu :
"Sikap yang diambil oleh panitia pengadaan apabila ditemukan kecurangan, dapat digugurkan." (Wawancara, 27 Februari 2023)

3. BKD Memberikan Kemudahan Dalam Mengakses Informasi Mengenai Cpn

- a. Pertama, hasil wawancara dengan Bapak Andry selaku Kepala Bidang Pengadaan yaitu :
"BKD memberikan kemudahan dalam mengakses informasi mengenai CPNS, iya buka saja website BKD Kaltim." (Wawancara, 27 Februari 2023)
- b. Kedua, hasil wawancara dengan Bapak Reza F selaku Pegawai Bidang Pengadaan yaitu :
"BKD memberikan kemudahan dalam mengakses informasi mengenai CPNS, iya banyak ya biasanya lewat website, sosial media di instagram BKD kami sering aktif posting seluruh kegiatan kepegawaian." (Wawancara, 27 Februari 2023)

4. Peraturan Kepala (Perka) Bkn No. 9 Tahun 2012 Bahwa Sistem Computer Assisted Test (CAT) Berkontribusi Lebih Dalam Proses Penerimaan CPNS Ke Arah Bebas KKN

- a. Pertama, hasil wawancara dengan Bapak Andry selaku Kepala Bidang Pengadaan yaitu :
"CAT berkontribusi lebih dalam proses penerimaan CPNS ke arah bebas KKN, Iya, karena melalui sistem CAT pelaksanaan test menjadi realtime dan hasil ujian dari masing-masing peserta dapat diketahui sesaat setelah menyelesaikan ujian, sehingga tidak ada peluang untuk oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan tindak indikasi KKN." (Wawancara, 27 Februari 2023)
- b. Kedua, hasil wawancara dengan Bapak Reza F selaku Pegawai Bidang Pengadaan yaitu :
"CAT berkontribusi lebih dalam proses penerimaan CPNS ke arah bebas KKN, karena CAT lebih transparan langsung terkoordinir hasil langsung keluar. Kekurangannya terkadang ada peserta yang tidak terbiasa mengoperasikan komputer akan kesulitan, sarana prasarana yang terbatas hanya terdapat 60 komputer yang tersedia sehingga jika ingin melakukan rekrutmen dalam jumlah besar akan sedikit terkendala." (Wawancara, 27 Februari 2023)

5. Pelamar Yang Keberatan Terhadap Pengumuman Hasil Akhir Seleksi Boleh Melakukan Sanggah

- a. Pertama, hasil wawancara dengan Bapak Andry selaku Kepala Bidang Pengadaan yaitu :
"Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil akhir seleksi, boleh melakukan sanggah." (Wawancara, 27 Februari 2023)
- b. Kedua, hasil wawancara dengan Bapak Reza F selaku Pegawai Bidang Pengadaan yaitu :

"Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil akhir seleksi, boleh melakukan sanggah, atau bisa bertanya mengenai spesifik nilai nanti diinfokan keterangan lulus dan nilainya karena biasanya letak kekurangannya tidak disebarluaskan secara terbuka karena terkait informasi pribadi." (Wawancara, 27 Februari 2023)

6. Pendapat Mengenai Diterapkannya Prinsip Transparansi Dalam Proses Penerimaan CPNS Pada BKD Provinsi Kaltim

- a. Pertama, hasil wawancara dengan Bapak Andry selaku Kepala Bidang Pengadaan yaitu :

"Pendapat mengenai pelaksanaan penerimaan CPNS apakah sudah menerapkan prinsip transparansi, sejauh kapasitas saya sebagai kepala bidang PPI ASN, melihat bahwa pelaksanaan penerimaan CPNS sekarang sudah jauh lebih baik dari sistem terdahulu, dan salah satu yang mempengaruhi adalah komitmen menerapkan prinsip transparansi." (Wawancara, 27 Februari 2023)

- b. Kedua, hasil wawancara dengan Bapak Reza F selaku Pegawai Bidang Pengadaan yaitu :

"Pendapat mengenai pelaksanaan penerimaan cpns apakah sudah menerapkan prinsip transparansi, iya tentu semuanya dilakukan dengan transparan bisa diawasi siapa saja, dan didukung oleh sistem cat dalam tes seleksinya." (Wawancara, 27 Februari 2023)

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan penerapan prinsip transparansi dalam pelaksanaan proses penerimaan CPNS pada BKD provinsi kalimantan timur berjalan dengan cukup baik dibuktikan dengan; informasi lowongan pendaftaran yang diumumkan secara terbuka dapat diakses dengan mudah.

Keadilan

Paparan berikut merupakan deskripsi data tentang penerapan prinsip good governance termasuk keadilan dalam proses penerimaan cpns pada badan kepegawaian daerah provinsi kalimantan timur yang didasarkan hasil wawancara.

1. Persyaratan Khusus Untuk Penyandang Disabilitas

- a. Pertama, hasil wawancara dengan Bapak Andry selaku Kepala Bidang Pengadaan yaitu :

"Persyaratan khusus yang dibutuhkan untuk penyandang disabilitas, tentu saja ada, karena memang formasi penyandang disabilitas adalah formasi khusus yaang diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bisa dilihat di Permenpan tentang pengadaan." (Wawancara, 27 Februari 2023)

- b. Kedua, hasil wawancara dengan Bapak Reza F selaku Pegawai Bidang Pengadaan yaitu :

"Persyaratan khusus yang dibutuhkan untuk penyandang disabilitas, iya wajib melampirkan surat dari Rumah Sakit dan upload video sehari-hari." (Wawancara, 27 Februari 2023)

2. Aksesibilitas Seleksi Kompetensi Peserta Cpn Minoritas

- a. Pertama, hasil wawancara dengan bapak andry selaku kepala bidang pengadaan yaitu :
"Aksesibilitas seleksi kompetensi peserta cpns minoritas, untuk fasilitas selama pelaksanaan tes sudah sesuai dengan standar operasional prosedur dengan memperhatikan dukungan/keramahan terhadap penyandang disabilitas, adanya parkir khusus, jalur khusus, panitia pendukung, dan lain sebagainya sehingga peserta yang merupakan penyandang disabilitas tidak kesulitan selama pelaksanaan tes." (Wawancara, 27 Februari 2023)
- b. Kedua, Hasil Wawancara Dengan Bapak Reza F Selaku Pegawai Bidang Pengadaan Yaitu:
"Aksesibilitas seleksi kompetensi peserta CPNS minoritas, untuk akses para disabilitas atau ibu hamil biasanya lebih kami dulukan, tempat tes seleksi juga berbeda biasanya di ruangan lantai 1." (Wawancara, 27 Februari 2023)

3. Para Panitia Seleksi Memberlakukan Perlakuan Yang Setara Kepada Para Peserta CPNS

- a. Pertama, hasil wawancara dengan Bapak Andry selaku Kepala Bidang Pengadaan yaitu :
"Panitia seleksi memberlakukan perlakuan yang setara kepada para peserta CPNS, iya pasti kami tidak membedakan semua sama." (Wawancara, 27 Februari 2023)
- b. Kedua, hasil wawancara dengan Bapak Reza F selaku Pegawai Bidang Pengadaan yaitu :
"Panitia seleksi memberlakukan perlakuan yang setara kepada para peserta cpns, kami selaku asn khususnya dilingkungan BKD prov. kaltim berkomitmen untuk mengenyampingkan kepentingan pribadi dan mengedepankan pelayanan prima kepada publik. oleh karena itu dalam pelaksanaan seleksi CPNS kami tidak pernah membedakan peserta dan memperlakukan sama sesuai dengan kapasitas pelaksanaan seleksi." (Wawancara, 27 Februari 2023)

4. Panitia Pengadaan CPNS Menanda Tangani Pakta Integritas

- a. Pertama, hasil wawancara dengan Bapak Andry selaku Kepala Bidang Pengadaan yaitu :
"Panitia pengadaan CPNS menanda tangani pakta integritas, iya setiap petugas seleksi akan menandatangani pakta integritas sebagai bentuk wujud komitmen panitia dalam menjalankan tugas penyelenggaraan seleksi CPNS. Penandatanganan pakta integritas ini bukan hanya sekedar seremonial saja, namun sebuah janji kepada diri, bangsa dan negara dalam melaksanakan dan menegakkan aturan perundang-undangan." (Wawancara, 27 Februari 2023)
- b. Kedua, hasil wawancara dengan Bapak Reza F selaku Pegawai Bidang Pengadaan yaitu :
"Panitia pengadaan CPNS menanda tangani pakta integritas, iya ada" (Wawancara, 27 Februari 2023)

5. CPNS Menanda Tangani Pakta Integritas

- a. Pertama, hasil wawancara dengan bapak andry selaku kepala bidang pengadaan yaitu :
"CPNS menanda tangani pakta integritas, iya karena merupakan wujud nyata dari komitmen seluruh asn dalam mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi, menumbuhkan keterbukaan dan kejujuran serta memperlancar tugas yang berkualitas, efektif dan akuntabel." (Wawancara, 27 Februari 2023)

B. kedua, Hasil Wawancara Dengan Bapak Reza F Selaku Pegawai Bidang Pengadaan Yaitu :

"Cpns Menanda Tangani Pakta Integritas, Perlu Biasanya Peserta Menanda Tangani Di Awal Saat Mengumpul Berkas Lamaran." (Wawancara, 27 Februari 2023)

6. Pendapat Mengenai Diterapkannya Prinsip Keadilan Dalam Proses Penerimaan CPNS Pada BKD Provinsi Kaltim

a. Pertama, hasil wawancara dengan Bapak Andry selaku Kepala Bidang Pengadaan yaitu :

"Pendapat mengenai pelaksanaan penerimaan CPNS apakah sudah menerapkan prinsip keadilan, berbicara prinsip keadilan kami selaku penyelenggara seleksi CPNS memberikan hak kepada seluruh peserta dengan kapasitas yang sama sesuai dengan SOP." (Wawancara, 27 Februari 2023)

b. Kedua, hasil wawancara dengan Bapak Reza F selaku Pegawai Bidang Pengadaan yaitu :

"Pendapat mengenai pelaksanaan penerimaan CPNS apakah sudah menerapkan prinsip keadilan, menurut saya pasti adil ya karena disini kita tidak pernah membedakan semua sama rata kita layani sama." (Wawancara, 27 Februari 2023)

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip keadilan dalam pelaksanaan proses penerimaan cpns pada bkd provinsi kalimantan timur berjalan dengan baik ini dibuktikan dengan; penyandang disabilitas mendapatkan kesempatan yang sama dengan peserta lainnya dan diatur secara proporsional. aksesibilitas pada saat melaksanakan tes juga menjadi perhatian panitia seleksi sehingga seluruh peserta dapat dimudahkan, dan pelayanan diberikan setara kepada seluruh peserta cpns tanpa membedakan latar belakang. sebagai bentuk wujud komitmen dalam menjalankan tugas panitia seleksi juga menandatangani pakta integritas penyelenggaraan seleksi.

Pembahasan

Fokus pembahasan yang dilaksanakan dalam penelitian ini yaitu pembahasan penerapan prinsip good governance dalam proses penerimaan CPNS pada badan kepegawaian daerah provinsi kalimantan timur yang meliputi prinsip akuntabilitas, transparansi dan keadilan.

Akuntabilitas

Penyelenggaraan penerimaan CPNS ini sangatlah penting sebagai awal dari mewujudkan tata kelola pemerintahan yang ideal sesuai dengan cita-cita negara untuk memakmurkan bangsa, panitia seleksi harus mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP) dikarenakan panitia seleksi bekerja ditentukan oleh kepatuhan mereka dalam menjalani Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada. Menurut Amin dalam (Hidayat, 2022) menjelaskan bahwa penerapan *good governance* mempunyai peran yang besar dan manfaat yang bisa membawa perubahan positif baik pemerintahan daerah, pemerintah pusat ataupun masyarakat umum, sehingga perlu diberikan perhatian khusus terhadap penyelenggaraannya terutama hal yang berkaitan dengan prinsip akuntabilitas mengenai keseluruhan proses seleksi yang berlangsung. Hal ini juga didukung oleh Tutu (2016) yang menyatakan bahwa prinsip *good governance* harus menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menjalankan kewenangan penerimaan calon CPNS, khususnya prinsip akuntabilitas. Hal ini dimaksudkan,

agar filosofi "*The right man on the right place*" (penempatan seseorang sesuai dengan keahliannya) tetap menjadi dasar pertimbangan dalam rangka penerimaan calon CPNS.

Transparansi

Informasi pendaftaran CPNS diumumkan secara terbuka atau transparan, semua bisa diterima oleh setiap mereka yang membutuhkan. Informasi bisa diakses, dipahami dan bisa dimonitor di laman *website* BKD dan sosial media instagram BKD dengan *username* bkdprovinsikaltim. Panitia Seleksi Instansi selalu menyebarluaskan informasi, membuka ruang seluas-luasnya kepada peserta yang memiliki pertanyaan melalui fitur *help desk* di *webite* BKD Kaltim. Lembaga negara harus selalu menyediakan dan mengumumkan informasi proses penyusunan peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik supaya masyarakat dan *stakeholder* bisa memahami dan melaksanakannya. Hal ini diperlukan supaya masyarakat dan *stakeholder* bisa mengawasi dan berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan publik (UNDP, 1997).

Keadilan

Para ASN BKD Prov. Kaltim sudah memberlakukan *equal treatment* (perlakuan yang setara) kepada para peserta CPNS baik laki-laki ataupun perempuan. Pernyataan ini sependapat dengan Tangkilisan (2005) bahwa semua warga Negara, baik laki-laki ataupun perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam meningkatkan dan menjaga kesejahteraan mereka serta terlibat di dalam pemerintahan. Para tim seleksi memberikan pelayanan yang baik, ramah kepada pelamar dan tim seleksi sigap membantu peserta yang membutuhkan penanganan yaitu dengan menyediakan ruang khusus untuk peserta yang memiliki kondisi khusus tersebut.

BKD sudah baik dalam pelayanannya tidak diskriminatif, pelaksanaannya terlaksana dengan lancar dan para tim seleksi mengupayakan peserta seleksi minoritas seperti peserta disabilitas, ibu hamil dan ibu pasca *caesar* mendapatkan aksesibel yang aman dan nyaman. Penggunaan istilah *good governance* diartikan sebagai tata pemerintahan yang baik (Basri, 2012) dapat terwujud sesuai dengan harapan yaitu mendapatkan aparatur sipil negara yang profesional dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan akuntabilitas dalam proses penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di BKD Provinsi Kalimantan Timur mulai dari pengumuman lowongan dibukanya penerimaan CPNS hingga pengumuman kelulusan sudah berjalan cukup baik dilihat dari fungsi portal SSCASN berfungsi sebagaimana mestinya dimana seluruh peserta melakukan pendaftaran secara terpusat melalui satu portal dan diatur sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan serta pengelolaan data yang termuat didalamnya dan dapat dijamin keamanannya, namun disisi lain karena keterbatasan teknis pada jaringan, seringkali portal mengalami gangguan saat masa penerimaan berlangsung.
2. Dalam prinsip transparansi yang diterapkan pada proses penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di BKD Provinsi Kalimantan Timur sudah berjalan dengan baik dapat dilihat dari

informasi pendaftaran CPNS diumumkan secara terbuka atau transparan. Informasi bisa diakses, dipahami dan bisa dimonitor.

3. Dalam penerapan prinsip keadilan para penyandang disabilitas mendapatkan kesempatan yang sama dengan peserta lainnya dan diatur secara proporsional. Aksesibilitas pada saat melaksanakan tes juga menjadi perhatian panitia seleksi sehingga seluruh peserta mendapatkan pelayanan yang setara tanpa membedakan latar belakang dikhususkan untuk penyandang disabilitas, ibu hamil dan pasca caesar para panitia akan memberikan akses yang sesuai dengan standar operasional prosedur, seperti jalur khusus, sarana pendukung, dan lain sebagainya. Para ASN BKD Prov. Kaltim sudah memberlakukan *equal treatment* (perlakuan yang setara) kepada para peserta CPNS baik laki-laki ataupun perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi. 2009. Metodologi Penelitian. Jakarta.
- Agustina. 2021. Systematic Literature Review: Implementasi Good Governance di Indonesia. Padang.
- Andriyadi. 2019. Good Governance Government and Government. Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies.
- Atmadja. 2017. International Conference On Guidance and Counseling. Pontianak: Islamic State Institut of Pontianak.
- Basri. 2012. Implementasi Prinsip-prinsip Good Governance Pada Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil. Makassar.
- Basrowi dan Sukidin. 2002. Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro. Surabaya. Insan Cendikia.
- Da Cruz, Carolina. 2021. Implementasi Prinsip-prinsip Good Governance Pada Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Timor Lester. Semarang.
- Fatimah. 2021. Implementasi Prinsip – prinsip Good Governance dalam Penerimaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Nusa Tenggara Barat. Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Hidayat. 2022. Analisis Pelaksanaan Prinsip-prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik (Studi pada Kantor Kecamatan Semarang Timur). Semarang.
- Kaloh. 2010. Kepemimpinan Kepala Daerah. Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Kedua).
- LAN-BPKP. 2000. Akuntabilitas dan Good Governance. Jakarta: LAN-RI.
- Masrul. 2019. Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Calon Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Studi di Kantor BKD Muaro Jambi). Jambi.
- Miles,M.B, Huberman,A.M, dan Saldana,J. 2014. Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Moloeng, Lexy J. 2011. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Pahlevi. 2013. Efektivitas Rekrutmen dan Seleksi dalam Memenuhi Kebutuhan Sumber Daya Manusia PT. Teknologi Riset Global Investema. Jakarta.
- Prihartini. 2021. Analisis Penerapan Prinsip Good Governance terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Tapang Pulau, Kec. Belitang Hilir, Kab. Sekadau). Pontianak.

- Pusat Pembinaan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. 1994. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Renstra. 2019-2023. Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kaltim. Kaltim. Persada.
- Rivai. 2014. Manajemen Sumber Daya Manusia. Raja Grafindo.
- Sedarmayanti. 2003. Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah. Bandung: Mandar Maju.
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta : Bandung.
- Sutrisno. 2011. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta.
- Tangkilisan. 2005. Manajemen Publik. Jakarta: PT. Grasindo.
- Tutu. 2016. Implementasi Good Governance dalam Proses Rekrutmen Aparatur Sipil Negara di Badan Kepegawaian Daerah Kota Manado. Manado.
- Umar, Husein. 2004. Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis. Jakarta PT Raja Grafindo Persada.
- UNDP. 1997. "Governance for sustainable human development".
- Widodo, Joko. 2001. Good Governance: Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Surabaya: Insan Cendekia
- Yullyanti, Ellyta. 2009. Analisis Proses Rekrutmen dan Seleksi pada Kinerja Pegawai. Perencanaan dan Pengadaan Biro Kepegawaian dan Organisasi ESDM. Vol. 16, No. 0854-3844.
- Zainal, Rivai. 2014. The Economics of Education. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- <http://kbbi.web.id/teori> Diakses 25 Februari 2023
- <https://bkd.kaltimprov.go.id/profil/tupoksi>. Diakses 17 Januari 2023
- <https://bkd.kaltimprov.go.id/profil/kepemimpinan> Diakses 17 Januari 2023